

Laporan Pemantauan Konflik di Aceh

1 Oktober – 30 November 2008

Bank Dunia



Jumlah insiden kekerasan menurun tajam pada bulan Oktober, yaitu 29 kasus yang dilaporkan, dan terus menurun pada bulan November hingga mencapai angka terendah pada tahun ini, yaitu 21 kasus.¹ Namun demikian, serentetan serangan granat dan pembakaran terhadap kantor KPA dan Partai Aceh² masih terus berlangsung. Jumlah angka perselisihan yang tinggi menyangkut persoalan tanah, kesempatan pekerjaan dan proyek-proyek konstruksi juga mengakibatkan terjadinya kekerasan. Pulangnya pemimpin GAM Hasan Tiro dari pengasingan pada bulan Oktober menimbulkan insiden-insiden yang relatif sedikit, akan tetapi peristiwa tersebut membawa sejumlah masalah-masalah politik dan ketegangan-ketegangan ke permukaan. Mendahului masa pemilihan pada tahun depan, peristiwa kedatangan tersebut berubah menjadi ajang unjuk kekuatan secara besar-besaran – yang dapat diperdebatkan sebagai bentuk pelanggaran – oleh Partai Aceh. Kedatangannya tersebut juga dianggap sebagai campur tangan dalam penyusunan peraturan daerah yang kontroversial yaitu usaha menghidupkan kembali Wali Nanggroe sebagai institusi milik Aceh, yaitu suatu posisi yang mungkin akan dijabat oleh Hasan Tiro di masa yang akan datang. Pemasangan berbagai material yang bernuansa separatistis oleh kerumunan KPA/PA semasa kunjungan tersebut memperburuk ketegangan-ketegangan terhadap pasukan-pasukan keamanan. Ketegangan-ketegangan tersebut tercermin melalui sejumlah benturan tanpa kekerasan antara aparat militer dengan KPA/PA. Kampanye dan persiapan bagi pemilihan umum pada tahun 2009 terus menimbulkan pertentangan-pertentangan dan insiden-insiden, terutama disebabkan oleh penyeberangan figur-figur politik ke partai-partai baru, dan tindakan-tindakan intimidasi. Terdapat resiko dimana pemilihan umum bisa menyebabkan dimulainya lagi sengketa-sengketa politik yang berlarut-larut di daerah-daerah yang memiliki sejarah persaingan tidak sehat antara elit politik, seperti yang di tunjukkan oleh gugatan baru terhadap Bupati Akmal Ibrahim di Aceh Barat Daya. Pembubaran BRR di masa yang akan datang serta serah terima pengawasan pekerjaan rekonstruksi kepada badan transisi yang baru juga menimbulkan kekhawatiran dan kontroversi.

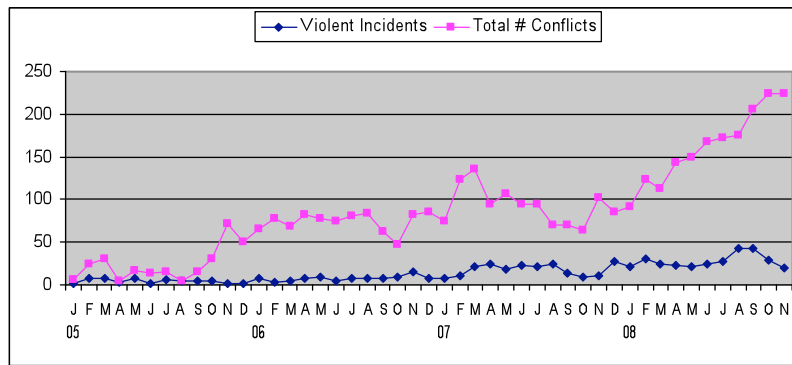
Kekerasan menurun tetapi konflik-konflik tetap tinggi dan penyerangan dengan granat dan pembakaran masih tetap berlangsung

Pada bulan Oktober dan November, jumlah konflik yang baru tetap tinggi, yaitu 224 setiap bulan. Jumlah insiden kekerasan menurun tajam, yaitu 29 kasus yang dilaporkan pada bulan Oktober dan 21 kasus pada bulan November, angka terendah yang tercatat dalam tahun 2008 (lihat Figur 1).

¹ Sebagai bagian dari program pendukung analitis terhadap proses perdamaian, maka Program Konflik dan Pengembangan, dalam lingkungan Kantor Bank Dunia di Indonesia dan melalui pendanaan dari Departemen untuk Pembangunan Internasional dari Kerajaan Inggris serta Kedutaan Besar Belanda, menggunakan metodologi pemetaan konflik melalui surat kabar untuk mencatat dan mengkategorikan seluruh insiden konflik di Aceh seperti yang diberitakan oleh dua surat kabar di provinsi Aceh (Serambi Indonesia dan Aceh Kita). Program tersebut menerbitkan update yang tersedia secara online di www.conflictanddevelopment.org. Kumpulan data tersebut tersedia bagi yang berminat; harap hubungi Adrian Morel di amorel1@worldbank.org. Terdapat keterbatasan dengan menggunakan surat kabar untuk memetakan konflik; lihat Barron and Sharpe (2005) yang tersedia di www.conflictanddevelopment.org/page.php?id=412.

² Komite Peralihan Aceh – KPA adalah organisasi sipil yang dibentuk untuk mewakili bekas pejuang dari sayap militer GAM (TNA). Partai Aceh (PA) adalah partai politik lokal yang didirikan pada pertengahan 2007 oleh pimpinan GAM. Walaupun KPA dan PA adalah entitas yang berbeda, struktur organisasi dan keanggotaannya saling melengkapi. Muzzakir Manaf, Ketua dari KPA, juga memimpin PA. Banyak dari kader-kader PA dan calon legislatif pernah menjabat, atau masih menjabat posisi-posisi dalam KPA. PA juga sangat bergantung pada jaringan rakyat biasa KPA untuk mobilisasi politik.

Figur 1: Insiden kekerasan dan total # konflik, setiap bulannya



Namun demikian, beberapa insiden yang serius sempat terjadi. Serangkaian serangan disertai tindak kekerasan terhadap KPA/Partai Aceh yang bermula pada bulan September dan dilanjutkan dengan pembakaran kantor pusat provinsi KPA di Banda Aceh pada tanggal 23 Oktober. Ketua PA Sabang juga menjadi korban dari dua insiden yang terjadi secara beruntun: rumahnya di rusak pada tanggal 29 Oktober, dan sebuah ruang pameran mobil miliknya di bakar pada tanggal 31. Bagaimanapun juga, kedua kasus tersebut berakar pada perselisihan di tingkat lokal dan tidak ada hubungannya dengan serangan yang lebih luas terhadap PA. Serangan di Langsa dan Banda Aceh, yang terjadi berturut-turut pada hari kedatangan Hasan Tiro dan tepat pada hari kepulangannya (lihat bahagian kunjungan Hasan Tiro dibawah), semakin memperburuk hubungan yang sudah tegang antara KPA/PA dengan pasukan keamanan. Ibrahim KBS, juru bicara KPA, mempertanyakan kegagalan polisi dalam menahan seorangpun dari para pelaku tindak kejahatan penyerangan tersebut. Dia mengatakan bahwa para penyerang tersebut bukanlah merupakan “penjahat biasa” dan “mungkin berasal dari kelompok yang tidak terjamah oleh pihak yang berwenang”, sehingga mengindikasikan kemungkinan terlibatnya militer atau dinas intelijen.³

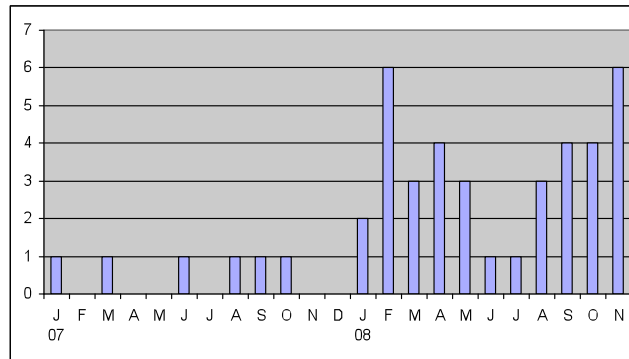
Sebuah granat juga dilemparkan pada sebuah kendaraan yang sedang menempuh perjalanan dari Lhokseumawe menuju Bireuen pada tanggal 10 Oktober, menciderai dua orang, kemudian sebuah granat meledak di depan rumah sekretaris dewan Kabupaten Lhokseumawe pada tanggal 16 November dan tidak menyebabkan jatuhnya korban. Tidak diketahui maksud dan tujuan dari serangan-serangan tersebut.

Konflik atas kasus-kasus tanah, pekerjaan dan proyek-proyek konstruksi mengarah ke kekerasan

Hal yang menonjol pada bulan Oktober dan November adalah meningkatnya secara relatif jumlah perselisihan atas kasus-kasus tanah, akses terhadap pekerjaan dan proyek-proyek konstruksi yang mengarah pada kekerasan. Insiden-insiden serupa itu telah meningkat secara dramatis pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (lihat Figur 2 dibawah). Hanya enam kasus yang dilaporkan pada tahun 2007 (satu kasus untuk setiap dua bulan), sementara 36 kasus terjadi dalam selang sepuluh bulan pertama dalam tahun ini (hampir satu kasus dalam setiap minggu). Insiden kekerasan yang berhubungan dengan sumber daya merepresentasikan hampir 20% dari keseluruhan insiden kekerasan pada bulan Oktober dan November. Tabel 1 dibawah menunjukkan separuh dari jumlah tersebut berhubungan dengan pemerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh polisi lalu lintas di jalan raya dan oleh preman atau kontraktor pada proyek-proyek konstruksi.

³ “Kantor KPA Pusat Digranat,” Serambi, 24 Oktober.

Figur 2: Jumlah insiden kekerasan terkait dengan sumber daya, per bulan (2007 dan 2008)



Tabel 1: Insiden kekerasan terkait sumber daya pada bulan Oktober dan November 2008

Jenis masalah	#	Deskripsi	Kerusakan
Masalah tanah	3	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat vs perusahaan swasta dua kasus. Masyarakat vs pembalak liar. 	Tanah dan fasilitas dibakar Peralatan logging dibakar
Akses terhadap pekerjaan	1	Masyarakat vs proyek pemerintah (tidak ada masyarakat setempat yang dipekerjakan).	Gedung pemerintah dibakar
Pemerasan / tender	5	<ul style="list-style-type: none"> Pemerasan dengan kekerasan oleh preman: dua kasus. Pemerasan dengan kekerasan oleh polisi (lalu lintas). Pemukulan pejabat pemerintah oleh kontraktor (kalah tender): dua kasus, salah satunya dilakukan oleh anggota KPA. 	Satu gedung dibakar Satu orang cedera Dua orang cedera
Lain-lain	1	Pertengkaran karena biaya parkir.	Satu orang cedera

Sebagai reaksi meningkatnya kekhawatiran terhadap pemerasan, polisi melakukan razia terhadap preman yang mengakibatkan penangkapan terhadap belasan orang pada bulan November. Kebijakan polisi ini seolah mencerminkan prasangka tertentu terhadap KPA.⁴ Oknum-oknum KPA terindikasi memang terlibat dalam pemerasan, dan petinggi KPA biasanya keberatan dalam pertanggungjawaban anggota-anggota yang menyimpang. Namun demikian, pemberian stigma terhadap organisasi tersebut akan meningkatkan resiko memperburuk ketegangan yang terjadi dengan pasukan keamanan dan akan semakin mempersulit KPA untuk lebih mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan penegakan hukum. Insiden pada bulan November seperti disebutkan diatas juga menunjukkan bahwa pasukan keamanan pun masih perlu memperbaiki disiplin internal maupun pertanggungjawaban.

Pulangny Hasan Tiro disambut oleh banyak orang dalam sukacita akan tetapi juga menimbulkan kontroversi

Pada tanggal 11 Oktober, Hasan Tiro, deklarator GAM, kembali ke Aceh dan merupakan kunjungan pertamanya setelah 29 tahun hidup dalam pengasingan di Swedia. Kerumunan massa, termasuk ribuan anggota KPA dari berbagai penjuru Aceh, berkumpul untuk menyambut kedatangan tokoh yang berusia 83 tahun tersebut di mesjid Baiturrahman, Banda Aceh. Ribuan orang juga menghadiri kemunculannya dimuka publik selama dua minggu kunjungannya ke daerah-daerah basis GAM di Pidie, Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Timur sebelum terbang kembali ke Swedia pada tanggal 26 Oktober.⁵

⁴ Sebagai contoh lihat pernyataan Kepala Polisi Daerah Aceh di Serambi pada tanggal 18 November, dimana beliau menggunakan ungkapan “*pajak nanggroe*” dalam menyebut pemerasan secara umum.

⁵ Masyarakat kurang antusias selama kunjungan Tiro di Meulaboh, dimana sejumlah besar penduduknya mendukung pembentukan provinsi ABAS. KPA menentang rencana ini.

Meskipun besarnya tantangan yang dihadapi untuk mengendalikan keamanan yang disebabkan besarnya jumlah massa yang berkumpul, serta mengingat buruknya catatan KPA, yang merupakan pendukung utama acara tersebut, dalam menegakkan disiplin diantara pengikut-pengikutnya, dalam kenyataannya hanya terjadi sejumlah kecil insiden. Pasukan keamanan menyesalkan tindakan kelompok pengikut KPA yang menunjukkan ideologi separatis dengan cara menurunkan bendera Indonesia dan diduga menyebarkan stiker-stiker pro-kemerdekaan (lihat Kotak 1). KPA menyalahkan tindakan tersebut akibat adanya “provokator”. Namun demikian, anggapan yang menyatakan bahwa kemenangan PA pada pemilu nanti akan berujung kepada penyusunan rencana referendum untuk kemerdekaan ternyata jauh dari yang dipikirkan para pimpinan dan anggota partai tersebut.⁶ Temuan oleh tinjauan lapangan oleh Ausaid/Bank Dunia menunjukkan bahwa persepsi demikian ternyata telah diterima secara luas oleh seluruh masyarakat dan sepertinya akan mempengaruhi perilaku pemilih walaupun bukan berarti bahwa hal itu akan menguntungkan PA. Hal tersebut juga memperburuk ketegangan yang ada diantara KPA/PA dengan bekas kelompok anti-separatis yang ada di lapangan (lihat Update September).

Kotak 1: Insiden sehubungan dengan Kunjungan Hasan Tiro

- Pada tanggal 10 Oktober. Minyak disebar oleh sekelompok orang tak dikenal di beberapa titik di jalan Medan-Banda Aceh untuk menghalangi rombongan massa yang menuju Banda Aceh untuk perayaan tersebut.
- Pada tanggal 11 Oktober, Banda Aceh. Pada saat perayaan tersebut di mesjid Baiturrahman, bendera nasional merah-putih sempat diturunkan. Para jurnalis juga mengeluhkan perlakuan kasar satuan keamanan KPA.
- Pada tanggal 14 Oktober, Pidie dan Aceh Utara. Polisi melaporkan bahwa stiker yang disebarluaskan dengan menggunakan simbol PA dan gambar Hasan Tiro's, dengan slogan yang bersifat separatis seperti: “Partai Aceh menang, selangkah lagi menuju kemerdekaan, Wali Nanggroe akan sangat senang”.
- Pada tanggal 20 Oktober, FKK menuduh Partai Aceh mengambil keuntungan dari kunjungan Hasan Tiro ini untuk menyalahi larangan kampanye politik.
- Pada tanggal 23 Oktober, Meulaboh. Rombongan Hasan Di Tiro's disambut dengan spanduk yang berlawanan.

Kepentingan KPA mengadakan kunjungan tersebut juga dipertanyakan. Forum Komunikasi dan Koordinasi untuk Perdamaian di Aceh (FKK) mengkritik KPA secara terbuka karena mengambil keuntungan dengan popularitas Tiro untuk mempromosikan Partai Aceh. Bisa dipastikan, spanduk PA dan materi kampanye tampak dimana-mana selama prosesi besar-besaran dari para pendukung yang mengawal *Wali Nanggroe*, telah menjadikan perjalanannya yang melintas provinsi-provinsi menjadi ajang unjuk kekuatan dari partai politik GAM. Komisi Pemilihan Independen (KIP) dan Partai Amanah Nasional (PAN) menyalahkan pelanggaran terhadap peraturan pemilihan umum: selama masa kampanye tertutup, undang-undang melarang pawai politik dari lebih 500 orang; pawai hanya diizinkan selama “kampanye terbuka”, yang baru akan dimulai bulan Maret tahun depan.

Akhirnya, kunjungan Hasan Tiro juga bisa dilihat sebagai plebisit untuk peran yang dia mungkin akan mengambil dalam pemerintahan Aceh ke depan. Pasal 1.1.7 MoU Helsinki memberikan mandat pembentukan kembali lembaga tradisional Wali Nanggroe. Kebanyakan orang Aceh melihat Tiro sebagai ahli waris yang sah bagi posisi tersebut. Kunjungannya berlangsung pada saat suatu *Qanun* sedang dirancang untuk menentukan batasan peran Wali Nanggroe, suatu isu dimana pihak Jakarta dan GAM masing-masing mempunyai interpretasi yang sangat berbeda satu dengan lainnya. UUPA mendefinisikan perannya sebagai sebutan kehormatan. Bagi GAM, posisi tersebut berarti sebagai posisi eksekutif tertinggi dalam pemerintah Aceh, dengan sejumlah hak prerogatif seperti hak untuk membubarkan dewan perwakilan rakyat, membebaskan tahanan dan memimpin pasukan bersenjata organik dalam “keadaan darurat”. KPA terus mendorong untuk menunda finalisasi dari Qanun hingga setelah pelaksanaan pemilu, yaitu ketika mereka akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap

⁶ Hal ini dibenarkan secara tidak langsung oleh Adnan Beuransyah, juru bicara PA, yang menghimbau pendukung KPA/PA secara luas, beberapa hari sebelum kunjungan Tiro, untuk tidak berteriak “Merdeka”. Lihat “*Jangan Teriakkan Kata Merdeka*”, Serambi tanggal 10 Oktober.

dewan perwakilan rakyat. Isu ini diperkirakan akan menjadi perdebatan penting antara anggota parlemen provinsi yang baru dan pemerintah pusat di masa yang akan datang.

Perselisihan antara militer dan KPA/PA

Ketegangan antara pasukan keamanan secara umum, dan militer secara khusus dengan KPA/PA telah meningkat secara nyata semenjak awal masa kampanye untuk pemilu tahun depan. Dilatarbelakangi kunjungan Hasan Tiro, sejumlah insiden telah menyebabkan perselisihan antara militer dengan KPA/PA pada bulan Oktober, kebanyakan disebabkan oleh simbol-simbol dan dugaan propaganda anti-MoU (lihat Kotak 2). Namun tidak ada benturan kekerasan dan keseluruhannya tampak sebagai operasi penegakan hukum yang sah. Meski demikian, walaupun tampak seperti tidak berbahaya tetap mengkhawatirkan, mengingat potensi adanya eskalasi kekerasan. Dalam hal tersebut, penangkapan dua orang tokoh PA di Aceh Timur oleh militer pada bulan September (lihat update terachir) terkesan telah menjadi preseden yang berbahaya. Pada bulan Oktober, militer Aceh Tamiang mengikuti langkah serupa dengan “menangkap” Ketua PA setempat “untuk membantu penyelidikan” kasus penculikan. Ketegangan yang terjadi kemudian cepat mereda, dan tidak ada pertikaian lanjutan yang tercatat pada bulan November antara TNI dengan KPA/PA. Meskipun demikian, mengingat semakin dekatnya masa pemilu, kedua belah pihak seharusnya mampu menahan diri dan menghindari provokasi yang tidak diperlukan. Ada kecenderungan militer untuk melampaui batasan kewenangan yang mereka peroleh dengan cara melibatkan diri dalam penegakan hukum, tugas yang seharusnya dilakukan oleh polisi, merupakan suatu kekuatiran.

Kotak 2: Perselisihan antara pasukan keamanan dengan KPA/PA pada bulan Oktober

- Pada tanggal 6 October, Nisam, Aceh Utara. Personil militer menurunkan tanda PA yang dianggap terlalu mirip dengan logo GAM. KPA mengeluh.
- Pada tanggal 14 October, Meulaboh. Pihak militer menyita VCD yang dianggap sebagai propaganda anti-MoU (diduga sebagai bahan pro-GAM yang lama).
- Pada 19 October, Aceh Tamiang. Menindak lanjuti penculikan dua pegawai negeri oleh orang yang bersenjata untuk memperoleh uang tebusan, maka militer “menjemput” ketua PA di Aceh Tamiang. Geger terhadap berita tersebut, suatu gerombolan PA berkumpul di depan kompleks militer tersebut, tetapi kemudian bubar setelah Ketua PA mengklarifikasi bahwa dirinya tidak sedang dipaksa untuk menyetujui.
- Pada tanggal 28 October, Aceh Barat. Pihak militer menangkap pendukung PA yang dituduh memamerkan spanduk GAM didepan warungnya.

Konflik Politik: “lompat pagar”, intimidasi dan dimulainya lagi konflik regional

Kampanye dan persiapan untuk pemilihan pada tahun depan terus mengakibatkan perselisihan-perselisihan dan insiden-insiden, walaupun secara relatif lebih sedikit (29 kasus pada bulan Oktober dan November dibandingkan dengan 24 hanya pada bulan September). Hal tersebut di gambarkan dengan lebih rinci dalam Tabel 2 dibawah.

Tabel 2: Insiden kekerasan dan non-kekerasan terkait pemilu 2009 pada bulan Oktober dan November 08

Jenis masalah		# kasus	% total
Intimidasi/Praktek kampanye tidak sehat	<i>Pembakaran serangan granat terhadap kantor PA</i>	2	34.5%
	<i>Intimidasi lainnya kekerasan</i>	3	
	<i>Isu spanduk</i>	4	
	<i>Lainnya</i>	1	
Pendaftaran calon (caleg)	<i>Test baca Al-qur'an</i>	1	20.5%
	<i>Pelanggaran, korupsi</i>	3	
	<i>Lainnya</i>	2	
Isu internal partai politik	<i>Perangkingan daftar caleg</i>	1	41.5%
	<i>Pindah ke partai lainnya</i>	10	
	<i>Lainnya</i>	1	
Others	<i>Pengaduan terhadap kinerja KIP</i>	1	3.5%
Total		29	100%

Sepertiga dari konflik yang berhubungan dengan pemilu merupakan perselisihan internal partai politik mengenai perpindahan anggota dewan ke partai lainnya, tindakan yang dikenal dengan sebutan “lompat pagar”. Lebih dari 25 anggota legislatif tingkat provinsi dan kabupaten yang direcall oleh partai asalnya sejak bulan September. “Pelompat-pagar” umumnya didominasi oleh anggota partai nasional yang menyeberang ke partai nasional yang lebih kecil atau ke partai lokal. Tindakan penyeberangan ini dapat dijelaskan sebagai harapan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi dalam daftar partai yang lebih kecil tersebut, dan juga fakta bahwa partai-partai lama, yang secara luas diasosiasikan dengan pemerintahan yang jelek dan tidak adanya perbaikan sosio-ekonomi selama masa konflik, diperkirakan akan kalah pada tahun depan. Sementara itu elite yang lama berharap tetap memegang kuasa dengan cara mengadopsi warna yang baru, sehingga partai-partai kecil menerima mereka dengan alasan kepentingan: “pelompat-pagar” membawa koneksi politik yang berharga, dana dan nama yang sudah dikenal. Perilaku oportunistis diantara para elit politik, termasuk partai politik lokal yang baru dibentuk, mencerminkan kelemahan yang nyata dari politik masyarakat Aceh.

Intimidasi masih menjadi perhatian. Selain serangan yang disertai kekerasan terhadap PA, dilaporkan juga terjadinya sejumlah insiden skala kecil. Perlu digarisbawahi bahwa penutupan sebuah kasus dapat bereskalasi menjadi konfrontasi luas antara pendukung kelompok yang saling bertikai. Menindaklanjuti laporan tentang intimidasi fisik terhadap wanita pendukung Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS) oleh anggota KPA di Bireuen pada tanggal 27 Oktober, maka sekelompok pemuda PKS melakukan demonstrasi didepan kantor PA di tingkat kabupaten. Demonstrasi tersebut mengakibatkan pemukulan terhadap anggota PKS oleh pendukung PA. Intimidasi tampaknya akan terus berlangsung, dan kemungkinan terus meningkat, dengan semakin mendekatnya masa pemilu. Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) telah tertunda selama beberapa bulan yang disebabkan oleh perselisihan secara hukum antara dewan perwakilan rakyat tingkat provinsi dengan pihak yang berwenang di Jakarta. Dengan tidak tersedianya sarana yang memadai untuk melaporkan dan menindak berbagai kasus, maka resiko akan meningkat dimana para pendukung akan melakukan main hakim sendiri, sehingga ada kemungkinan terjadinya perselisihan dengan kekerasan. Kekhawatiran lainnya adalah bahwa intimidasi tidak hanya dapat dihubungkan dengan tokoh dan anggota partai yang tidak disiplin, tetapi juga seperti pada beberapa kasus disebabkan oleh aparat pemerintah. Hal tersebut dapat digambarkan dengan dua kasus di Nagan Raya, dimana masyarakat mengeluh terhadap tekanan yang dikoordinasikan oleh pejabat kabupaten dan kecamatan untuk memilih partai nasional yang dominan di daerah tersebut.

Intimidasi juga mencoreng putaran pertama pilkada langsung di Kabupaten Pidie Jaya. Tiga orang menjadi korban pada dua kasus yang dilaporkan. Sasaran utama keluhan dan tuduhan adalah KPA, dan mereka mengaku terhadap kelakuan buruk yang dilakukan oleh anggotanya dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Satu dari dua calon yang akan bersaing pada bulan Desember didukung oleh KPA/PA.

Akhirnya, pemanfaatan kekuasaan sebelum masa pemilihan di tahun depan juga dapat berdampak terhadap konflik regional yang sudah berlangsung lama. Tahun lalu di Aceh Barat Daya (Abdya), Bupati Akmal Ibrahim dan elite yang bermusuhan melalui demonstrasi dan demonstrasi balasan secara besar-besaran selama tiga bulan (lihat Update September hingga November 2007). Oposisi Akmal baru-baru ini meraih kembali momentum dengan beredarnya materi pornografi melalui sms yang memperlihatkan Akmal bersama dengan seorang wanita. Kasus tersebut mengakibatkan timbulnya desakan baru agar Akmal mengundurkan diri. Musuh-musuh Akmal dicurigai berada dibalik kasus ini. Pemilu tahun depan membuka harapan dan kesempatan baru bagi persaingan elite untuk mengejar ambisi mereka, gelombang baru keresahan akibat politik sangat mungkin terjadi di daerah-daerah dengan sejarah ketegangan seperti Abdya, Nagan Raya, Aceh Tengah and Aceh Tenggara. Persaingan politik akan sehat apabila disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang sepatutnya. Namun demikian, pada kabupaten seperti tersebut diatas terlihat adanya

kecenderungan untuk memilih bentuk-bentuk konfrontasi dan sering dalam terjadi dalam bentuk kekerasan..⁷

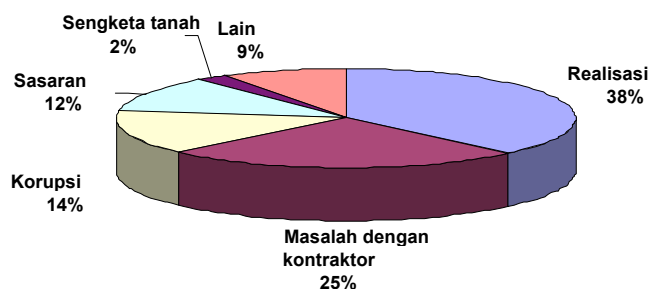
Kekhawatiran terhadap masa depan dari usaha rekonstruksi, setelah BRR berakhir

Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias (BRR), yaitu badan ad-hoc pemerintah yang dibentuk pada tahun 2005 untuk menanggulangi usaha rekonstruksi pasca-tsunami, akan mengakhiri kegiatan-kegiatannya pada tanggal 16 April tahun depan. Setelah badan mengurangi stafnya, menyerahkan berbagai asetnya dan menutup cabang-cabangnya, timbul kekhawatiran yang terus meningkat tentang bagaimana memastikan agar kelanjutan pelaksanaan program-program rekonstruksi berjalan dengan mulus. Rancangan keputusan presiden akan mengusulkan dibentuknya badan yang baru, yaitu Badan Koordinasi dan Rekonstruksi Aceh (BKRA), berada di bawah pemerintah provinsi. Pada tanggal 26 November, Gubernur Irwandi Yusuf menolak rancangan tersebut, dengan dasar bahwa rancangan tersebut hanya memberi mandat kepada BKRA hingga akhir tahun 2009, serta terbatasnya peran untuk koordinasi, selain itu alokasi anggaran terbesar akan tersebar diantara beberapa departemen teknis. Irwandi lebih mengharapkan untuk dibentuknya badan yang lebih terintegrasi, koordinator sekaligus badan pelaksana, dengan mandat hingga tahun 2012.

Kontroversi lainnya adalah sehubungan dengan penilaian keseluruhan kinerja BRR. Pada bulan November, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan ranking kinerja tertinggi kepada BRR dalam mengelola anggaran tahun 2007 (Rp. 10 triliun; kurang lebih US\$ 1 milyar). Ranking tersebut menimbulkan protes oleh masyarakat sipil, yang selama ini sangat kritis terhadap hasil prestasi BRR. Memang benar, data kami menunjukkan bahwa sejak bulan Oktober 2006, BRR telah menerima lebih dari 200 keluhan, dimana jumlah protes ketiga besar adalah mengenai penyalahgunaan dana dan korupsi (lihat Figur 3). Sebuah badan yang bertanggungjawab terhadap suatu misi yang penuh tantangan seperti rekonstruksi Aceh pasca-tsunami akan sangat sulit menghindari dari kritik, dan jumlah hitungan kami terhadap keluhan yang ada bukanlah merupakan indikator yang dapat diandalkan bagi ukuran kinerja yang sebenarnya. Namun demikian, hal tersebut menggarisbawahi rendahnya tingkat kepuasan penerima manfaat.

Apakah BKRA akan memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan tepat, masih merupakan tanda tanya. Besar kemungkinan badan tersebut akan memperoleh mandat yang lebih kecil, dan menurut dugaan akan memiliki kapasitas yang lebih rendah. Penggantian BRR dengan badan ad-hoc lainnya juga memperlambat proses normalisasi dimana seharusnya fungsi pembangunan diserahkan kepada dinas-dinas di tingkat provinsi dan kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah dengan pembentukan BKRA akan membantu atau menghambat proses transisi yang terbukti susah, masih menjadi pertanyaan.

Figur 3: Rincian keluhan terhadap BRR, per tipe masalah, sejak Oktober 2006



⁷ Sebagai contoh di Aceh Tenggara, sengketa yang berlarut-larut mengenai hasil pilkada tahun 2006 mengeskalasi sederetan insiden dengan kekerasan pada bulan Agustus tahun lalu (lihat Update Agustus 2007).